

SALING DUKUNG: KEMITRAAN KELUARGA DAN MASYARAKAT DENGAN MADRASAH

Matali,
Matali.s.pd.mm@gmail.com
MAN 2 Banyuwangi

Abstract

Education is one of the basic human needs. In line with that government and society established various educational institutions, one of which is Madrasah. Educational institutions are directly located in the midst of a community, thus making it an institution close to the family and community environment. This condition resulted in the emergence of close relationship or partnership between family and society with Madrasah. The background that causes the partnership is the existence of functional interdependence in order to realize the same goal, which is to provide education for the younger generation. Behavior of partnership between social system is not always in the form of formal system, but sometimes form of informal behavior among others is social and material contribution in the hope that more passionate teacher in carrying out its duty. Teachers can act as a culture broker that is the modernization agent because the teacher has the resources of mastery of science of religion as well as science and technology. Because the advantages of these teachers resulted in not a few teachers appreciated and occupied an important position in the social environment.

Keywords: *partnership, mutual support, culture broker*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan bantuan pendidikan seseorang mampu memahami dan menginterpretasikan masalah yang dihadapi dilingkungannya. Seperti yang diungkapkan oleh Oemar Hamafik (2000 :3) bahwa pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya. Selain itu pendidikan juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM baik fisik, mental maupun spiritual. Pendidikan juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa (Mulyasa, 2007 :4).

Pendidikan termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia. Sejalan dengan itu pemerintah dan masyarakat mendirikan berbagai lembaga pendidikan, salah satu di antaranya adalah Madrasah. Lembaga pendidikan secara langsung bertempat di tengah-tengah suatu komunitas, sehingga

menjadikannya sebagai lembaga yang dekat dengan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pada hakekatnya keberadaan madrasah merupakan wujud dari kesadaran keberagamaan masyarakat muslim, terhadap pentingnya mempersiapkan generasi masa depan yang memiliki kompetensi dan pemahaman agama yang baik, yang berwawasan kebangsaan, juga bisa memahami dan mengimplementasikan falsafah Bhineka Tunggal Ika. Agar memahami dan bisa hidup dengan benar di dalam masyarakat Indonesia yang plural atau majemuk. Bagi umat ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dapat memahami kesejadian pluralisme atau kemajemukan sebagai “sunnatullah dan hukum kesejarahan”, maka niscaya kemajemukan ini dianggap “berkah”, dan akan dinikmati sebagai “hidangan” istimewa hubungan sosial dan keagamaan. Sebagai modal moral, mental spiritual untuk membangun kerukunan dalam mewujudkan masyarakat beradap. Keberagaman keagamaan merupakan ketentuan Tuhan, yang semestinya disikapi oleh generasi masa depan sebagai hak demokratisasi di tengah keberagaman bagi masing masing pemeluk agama. Generasi masa depan harus memahami bahwa beragama di Indonesia harus dalam konteks Pancasila. Siapapun yang sudah meniti jalan beragama dalam bingkai Pancasila bersempoyan “Bhineka Tunggal Ika”, memiliki keharusan mengakui eksistensi keberagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan sesamanya dalam keberagaman. Meskipun agama yang dianut orang lain dalam wacana tafsiran ajaran agamanya dinilainya berbeda (Faih, 2011: 434). Hal yang demikian bisa didapatkan oleh generasi masa depan diantaranya dengan mengikuti serangkaian program pendidikan di madrasah.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa perkembangan Madrasah tergantung pada seberapa besar perhatian keluarga-keluarga umat Islam di lingkungan masyarakat sekitar yang menjadi pendukung madrasah tersebut untuk memelihara eksistensi dan keberlangsungannya.

Kondisi ini mengakibatkan munculnya hubungan erat, kemitraan antara keluarga dan masyarakat dengan Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik “kentalnya” pendidikan Agama Islam. Kondisi obyektif masih menampakkan bahwa masyarakat dominan dilibatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan. Karenanya diperlukan kedekatan pada informasi yang terkait dengan pendidikan di madrasah antara komunitas masyarakat dan pemerintah. Diperlukan sosialisasi yang memadai terkait kondisi obyektif madrasah terhadap dan sebagai mitra masyarakat. Kemitraan tersebut melahirkan perilaku yang menarik untuk ditelaah. Artikel ini menelaah hal-hal penting, yakni latar belakang yang menimbulkan kemitraan antara keluarga dan masyarakat dengan Madrasah, dan wujud perilaku kemitraan dengan lebih menekankan pada motivasi yang diberikan, baik oleh orang tua murid maupun masyarakat

kepada guru, yakni berbentuk Kontribusi sosial dan material dengan tujuan agar proses pendidikan lebih bergairah sebagaimana tugas di bidang pendidikan yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitas pendidikan yang dijalankan madrasah. Dalam kaitan ini diharapkan mampu menggugah revitalisasi hubungan madrasah dengan masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Timbulnya Kemitraan Antara Keluarga Dan Masyarakat Dengan Madrasah

Latar belakang yang menyebabkan timbulnya kemitraan antara keluarga dan masyarakat dengan Madrasah berkaitan erat dengan adanya kenyataan bahwa mereka memiliki hubungan erat saling ketergantungan yang bersifat fungsional dalam rangka mewujudkan tujuan yang sama, yakni menyelenggarakan pendidikan bagi generasi muda, generasi masa depan Bangsa Indonesia. untuk mewujudkan manusia yang menguasai “Iptek dan Imtaq” yang beraqlak mulia. Pendidikan pada dasarnya ialah pemanusiaan, memuat hominisasi dan humanisasi. Hominisasi merupakan proses pemanusiaan secara umum, yakni memasukkan manusia dalam lingkup hidup manusiawi secara minimal. Humanisasi adalah proses yang lebih jauh, kelanjutan homonisasi. Dalam proses ini, manusia bisa meraih perkembangan yang lebih tinggi, seperti nampak dalam kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (Driyarkara, 2006). Manusia yang tahu dan mau bertindak sebagai manusia dan apa yang mereka lakukan benar-benar bersifat manusiawi dan terus semakin manusiawi. Tujuan ini penting mengingat adanya kenyataan bahwa manusia adalah makluk sosial, sehingga setiap saat mereka berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi tersebut, huminisasi dan humanisasi merupakan suatu persyaratan yang tidak bisa ditawar.

Pada masyarakat tradisional penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat (Lighth, Keller dan Calhoun, 1989): 467). Namun perubahan sosial yang cepat antara lain sebagai akibat dari pembangunan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan tujuan pokok mentransformasikan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang religius, mengakibatkan “pengetahuan rakyat pedesaan” yang disosialisasikan di lingkungan keluarga dan masyarakat dianggap tidak memadai lagi dalam rangka mewujudkan huminisasi dan humanisasi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa masyarakat pada umumnya lebih menekankan pada pengadopsian “praktik-praktik” yang serba modern, maju dan non tradisional dalam kebudayaan, teknologi, dan kehidupan ekonomi. Pencapaian sasaran itu tidak bisa lagi hanya mengandalkan diri pada keluarga dan masyarakat, melainkan sangat memerlukan madrasah.

Oleh karena itulah Russel dan Bernardin (1993: 47) menunjukkan pendapat lama yang mengatakan bahwa pendidikan sepenuhnya bisa diselenggaran di lingkungan keluarga adalah ketinggalan zaman. Dengan demikian tidak mengherankan jika saat ini pendidikan Madrasah oleh sebagian anggota masyarakat dimasukkan ke dalam salah satu unsur kebutuhan dasar manusia, sejajar dengan kebutuhan dasar lainnya, seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan lain-lain. Walaupun fungsi Madrasah saat ini tampak semakin besar untuk pendidikan anak, namun Madrasah tetap tidak bisa sepenuhnya menggantikan fungsi-fungsi keluarga. Bahkan kelangsungan hidup Madrasah dengan segala dinamika aktivitasnya sangat memerlukan kemitraan dengan keluarga.

Keluarga membesarkan anak-anaknya dengan memberikan berbagai kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan lain-lain. Di samping itu keluarga juga menanamkan tata nilai dan tata kelakuan serta perilaku yang disertai pula dengan *control social*, sehingga anak-anak bisa bertindak sebagai warga suatu *system social* (Goode, 1983: 8-9). Madrasah tidak mencampuri usaha keluarga dalam membesarkan anak-anak mereka secara fisik. Madrasah hanya tinggal memproses anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga, guna menghasilkan suatu keluaran atau output yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Pada proses inipun berbagai tata nilai dan tata kelakuan serta perilaku yang ditanamkan di lingkungan keluarga sangat membantu Madrasah. Di samping itu, keluarga termotivasi pula memberikan kontribusi *financial* kepada madrasah, dan menyediakan alat-alat pelajaran serta sumberdaya lainnya yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Kontribusi pemikiran dan finansial tersebut sangat bermanfaat bagi penyelenggarakan kegiatan pembelajaran di Madrasah. Motivasi akan diberikan pada anak-anak yang melalaikan tugasnya oleh pihak Madrasah. Sangsi tersebut secara otomatis pula atau tidak langsung akan mengenai orang tua murid. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, keluarga memberikan pula pengawasan terhadap kegiatan belajar anak-anak di rumah.

Kedudukan masyarakat tidak jauh berbeda dari Madrasah. Kehadiran Madrasah juga tidak menghapuskan fungsi masyarakat. Masyarakat sebagai wadah kerjasama antara keluarga dalam menyediakan sarana fisik dan kelembagaan tidak bisa diambil alih oleh madrasah. Masyarakat berkewajiban secara terus menerus memproses setiap generasi muda agar melembagakan sistem sosiokultural yang berlaku, sehingga masyarakat tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Anak-anak yang dibentuk oleh masyarakat menjadi masukan bagi Madrasah.

Dengan demikian tidak mengherankan anak-anak yang memasuki suatu Madrasah akan membawa pula nilai, kebiasaan, sikap dan ketrampilan yang disosialisasikan oleh masyarakat. Madrasah hanya tinggal

memprosesnya lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Begitu pula sarana fisik yang disediakan masyarakat, misalnya jalan dapat digunakan oleh guru dan murid. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, guru yang mengajar pada suatu Madrasah, bisa pula memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar. Hal ini amat lebih penting karena dapat meningkatkan aktivitas belajar anak didik.

Kemitraan mereka tentu tidak hanya berbentuk "keiklasan" keluarga dan masyarakat menyerahkan warganya untuk diproses atau dididik di Madrasah, melainkan disertai pula tindakan kontrol sosial dan pengenaan sanksi, paling tidak berbentuk sanksi sosial. Madrasah yang melalaikan kewajibannya sehingga usaha memanusiakan, baik dalam proses maupun keluaran tidak sesuai dengan harapan keluarga dan masyarakat, mereka akan memberikan sanksi sosial, misalnya berbentuk gunjingan dan cemoohan.

Kemitraan antara keluarga dan masyarakat dengan Madrasah, tidak hanya berbentuk pertukaran keluaran dan masukan yang secara formal digariskan dalam kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan Madrasah, tetapi bisa pula berwujud suatu tindakan yang berbentuk rangsangan agar guru serta sivitas madrasah lainnya lebih bergiat dalam menunaikan tugasnya untuk mencerdaskan generasi masa depan.

Perilaku kemitraan mendasarkan diri pada suatu gagasan bahwa pendidikan formal sangat memerlukan jasa guru. Tugas guru di Madrasah adalah mengelola kegiatan pembelajaran. Tugas tersebut dianggap sebagai usaha guru mendorong muridnya ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Kemitraan memandang semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap madrasah merupakan pihak yang dapat didayagunakan dan mampu membantu madrasah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam kemitraan. Grant (1979:128) mengingatkan bahwa kemitraan tidak boleh mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kemandirian. Dalam hal menumbuhkan kemandirian, secara eksplisit dianjurkan agar setelah terbentuknya kelompok kemitraan masing-masing anggota harus menjaga kentralan khususnya dalam segi politik. Orang tua dan anggota masyarakat mau tidak mau membuat mereka berpartisipasi aktif dalam aktifitas yang berkaitan dengan madrasah secara sukarela dan netral.

B. Revitalisasi Hubungan Keluarga dan Masyarakat dengan Madrasah

Revitalisasi hubungan masyarakat dengan madrasah sangat diperlukan. Hal ini penting karena madrasah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan dalam merealisasikan program tersebut. Sementara masyarakat memerlukan jasa madrasah untuk mendapatkan program-program pendidikan yang relevan. Oleh karena itu segenap pimpinan, guru dan warga madrasah diharapkan aktif membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

Kemitraan masyarakat dengan madrasah antara lain dimaksutkan untuk: (1) mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap madrasah, (2) menilai program madrasah, (3) mempersatukan keluarga, orang tua atau wali murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik, (4) mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan madrasah dalam era globalisasi, (5) membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap madrasah, (6) memberitahu masyarakat tentang pekerjaan madrasah, (7) mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program madrasah (Mulyasa, 2005: 66)

Pada zaman sekarang dalam iklim yang kompetitif ini, sulit bagi organisasi atau lembaga pendidikan untuk dapat "eksis" dengan baik jika tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan mampu berkembang seiring dengan tuntutan "stakeholder". Kondisi ini berlaku hampir pada keseluruhan organisasi atau lembaga pendidikan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang "*non-profit*" juga tidak terlepas dari fenomena ini. Itulah sebabnya dalam banyak hal lembaga pendidikan harus mengetahui berbagai harapan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini telah memberikan regulasi kepada lembaga pendidikan untuk selalu menyertakan masyarakat dalam seluruh kegiatan melalui apa yang disebut dengan komite madrasah.

Dalam paradigma lama menunjukkan bahwa keluarga, madrasah dan masyarakat dianggap sebagai institusi yang terpisah-pisah. Oleh karena itu, terasa tidak "baik" kalau masyarakat ikut campur tangan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Apalagi sampai masuk ke wilayah kewenangan profesionalisme guru. Sebaliknya, dewasa ini dalam batas-batas tertentu, anggapan semacam itu semakin luntur. Keluarga berhak mengetahui apa saja yang diajarkan kepada anak-anaknya, dengan fasilitas apa anak-anak dididik. Pada porsi inilah hubungan antara keluarga dan madrasah mulai terjalin. Masyarakat pun berhak mengetahui apa yang terjadi di madrasah, bisa memberikan sumbang saran dan *financial* untuk peningkatan mutu pendidikan. Dari sinilah terjadi hubungan saling mengisi dan saling memberi antara madrasah, keluarga dan masyarakat. Hubungan ini selanjutnya berkembang menjadi hubungan kemitraan (Ate dan Gunawa, 2013).

Kepala Madrasah dan segenap guru merupakan kunci keberhasilan hubungan kemitraan madrasah dengan masyarakat, yang harus menaruh perhatian terhadap apa yang terjadi pada peserta didik di madrasah serta apa yang dipikirkan oleh orang tua wali, keluarga peserta didik juga masyarakat tentang madrasah. Hubungan Kemitraan Komite Madrasah dan Kepala Madrasah (madrasah) dengan masyarakat adalah komponen pendidikan nasional yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, harus ada hubungan

yang harmonis antara madrasah dan masyarakat dan keluarga. Hubungan yang harmonis akan terwujud apabila ada saling pengertian antara madrasah, orang tua atau keluarga peserta didik dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat, termasuk dunia kerja. Setiap unsur mempunyai peran yang masing-masing, sehingga membentuk satu kesatuan dalam sebuah sistem masyarakat, seperti pihak madrasah, masyarakat, dan pemerintah mempunyai peran masing-masing yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif agar dapat lebih memahami, membantu, dan mengontrol proses pendidikan di madrasah.

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana daerah (termasuk di dalamnya adalah madrasah) diberi kebebasan untuk mengelola dan memberdayakan potensi madrasahnya masing-masing. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan dan sebagai upaya untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat, sekaligus dapat menjamin terwujudnya demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan mutu pendidikan.

Telah disadari bersama bahwa pendidikan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan generasi berkualitas. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu untuk membentuk dirinya menjadi pribadi yang beradab, sosial, berbudaya dan religius. Bangsa yang kuat dan maju secara imperatif memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga bidang apapun yang dipandang penting bagi kehidupan senantiasa menempuh pendekatan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai proses personalisasi, enkulturası, regenerasi, bahkan dalam spektrum yang lebih luas, pendidikan menjadi alat melakukan rekayasa-rekayasa sosial seperti ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Penyesuaian paradigma dalam hal hubungan keluarga, madrasah dan masyarakat terjadi seiring perubahan yang terjadi di dunia pendidikan sebagai akibat dari berubahnya norma dan pranata masyarakat sebagai akibat dari perubahan zaman. Globalisasi, dengan revolusi informasi dan teknologinya, membuat dunia serasa semakin kecil. Batasan waktu dan ruang hampir tidak ada lagi. Arus informasi mengalir bebas dari satu belahan bumi ke belahan bumi lainnya (Ate dan Gunawa, 2013).

Kemitraan perlu ditumbuhkan, dikembangkan dan dipelihara karena adanya tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk memberikan pendidikan

berkualitas prima. Kompleksitas persoalan dan tantangan yang melingkupi dunia pendidikan sebagai akibat dari perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat membuat tidak ada satu pihak pun yang bisa menyelesaikan masalah seorang diri. Tidak ada lagi *single fighter* yang bisa mengatasi semua masalah yang ada. Pergeseran peran utama pemerintah dan swasta sebagai pemasok utama ke masyarakat membuat kemitraan semakin nyata urgensinya. Pemerintah dan swasta tidak bisa lagi berperan sebagai satu-satunya yang menyediakan, menyelenggarakan dan mengawasi keberlangsungan pendidikan karena keterbatasan sumber-sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks masa kini, partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan tidak bisa lagi dipandang hanya sebatas kewajiban. Partisipasi masyarakat kini adalah hak (Dwiningrum, 2011:51).

Untuk mengatasi permasalahan ini, keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Kemitraan adalah solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan dan distribusi sumberdaya di semua pihak. Kemitraan memungkinkan terjadinya sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Semua pihak berharap tersedianya pendidikan dengan kualitas prima sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Harapan ini sulit diwujudkan kalau keluarga dan masyarakat, hanya menumpukan beban di pundak madrasah. Tuntutan akan tersedianya pendidikan berkualitas prima baru bisa dipenuhi manakala terjadi hubungan kemitraan aktif interaktif antara madrasah, keluarga dan masyarakat dalam konteks pemberdayaan (Ate dan Gunawa, 2013).

Kepala madrasah dituntut untuk selalu membina dan mengembangkan hubungan kerjasama harmonis yang baik antara madrasah dan masyarakat guna mewujudkan madrasah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk: (1) saling pengertian antara madrasah, orang tua, masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja, (2) saling membantu antara madrasah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing (3) kerjasama yang erat antara madrasah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di madrasah (Mulyasa, 2005: 68)

Dengan demikian diharapkan masyarakat memiliki partisipasi yang sangat tinggi terhadap pendidikan di madrasah. Terkait dengan partisipasi masyarakat ini, Faisal (2007) menekankan partisipasi pada dua hal penting, yaitu: pertama, partisipasi sebagai suatu gerakan masyarakat (*social movement*). Kemudian yang kedua adalah, partisipasi sebagai praktik sosial yang membudaya dan berkelanjutan. Dengan kedua cakupan makna tersebut, maka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tidak cukup diwujudkan hanya dalam aktivitas parsial seperti sekedar membayar sumbangan

pendidikan, tetapi merupakan aktivitas yang berkesinambungan dan terlembaga untuk mengontrol terhadap seluruh proses pendidikan agar berjalan sesuai dengan standar mutu pendidikan. Dalam bentuk formal di madrasah terdapat Komite Madrasah pada tiap-tiap satuan pendidikan, dan Dewan Pendidikan, yang terikat pada fungsi normatifnya sebagai berikut: yakni sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), dan badan mediator (*mediator agency*).

Melalui hubungan yang harmonis dengan masyarakat, madrasah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dan melaksanakan proses pendidikan secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualitas ini tampak dari penguasaan peserta didik terhadap berbagai kompetensi dasar yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja di dunia usaha, melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hidup di masyarakat secara layak, dan belajar untuk terus meningkatkan diri sesuai dengan asas life long learning atau belajar sepanjang hayat (Mulyasa, 2005: 68).

C. Perilaku Saling Dukung

Dalam kemitraan yang berlaku adalah prinsip egaliter. Masing-masing pihak yang bermitra memiliki posisi dan tanggung jawab yang sama. Hubungan atas-an-bawahan tidak berlaku dalam konteks kemitraan. Masing-masing menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tugas dan batas-batas wewenang yang dimiliki. Kemitraan antara keluarga dan masyarakat dengan Madrasah tidak hanya berbentuk pertukaran keluaran dan masukan yang secara formal digariskan dalam kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan madrasah, tetapi bisa pula berwujud suatu tindakan yang berbentuk rangsangan agar guru lebih bergiat dalam menunaikan tugasnya. Hal ini, dapat ditunjukkan dari perilaku warga Madrasah yang menerapkan suatu perilaku yang saling mendukung. Kemitraan dalam konteks hubungan antara madrasah, keluarga dan masyarakat kemitraan bukan sekedar sekumpulan aturan main yang tertulis dan formal atau suatu kontrak kerja melainkan lebih menunjukkan perilaku hubungan yang bersifat intim antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak saling membantu untuk mencapai tujuan bersama.

Perilaku saling mendukung (saling dorong) mendasarkan diri pada gagasan bahwa pendidikan formal amat memerlukan jasa guru. Tugas guru di madrasah adalah mengelola kegiatan belajar-mengajar. Tugas tersebut, dianggap sebagai usaha guru mendorong muridnya ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Kegiatan tersebut, amat berat sehingga memerlukan kemitraan, baik antara guru dengan orang tua murid maupun masyarakat. Wujud perilaku kemitraan yang harus diperlihatkan oleh orang tua murid maupun masyarakat

adalah memberikan dorongan kepada guru agar lebih kuat lagi mendorong anak-anak yang dididik. Dengan demikian, timbulah suatu rangkaian kegiatan saling dorong, yakni guru mendorong anak didiknya, kemudian orang tua dan masyarakat berada di belakang ikut memberikan dorongan, baik kepada guru maupun anak didik, sehingga melahirkan suatu gerakan yang serentak menuju ke arah pencapaian tujuan pendidikan.

Aktualisasi dengan saling dorong atau saling mendukung di kalangan orang tua murid, tidak saja berbentuk ketaatan menunaikan kewajiban untuk melancarkan segala bentuk kegiatan pendidikan di madrasah, tetapi juga keiklasan mereka memberikan kontribusi kepada lembaga yang beraneka ragam bentuknya. Hakikat kemitraan ini adalah adanya keinginan untuk berbagi tanggungjawab yang diwujudkan melalui perilaku hubungan di mana semua pihak yang terlibat saling bantu-membantu untuk mencapai tujuan bersama.

Keluarga dan Masyarakat serta Madrasah mengharapkan munculnya sosok seorang guru yang disegani (bukan ditakuti) oleh para siswa. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik, pribadi, social dan professional. Oleh karena itu guru diharapkan memiliki sifat-sifat; beriman bertaqwa kepada ALLAH SWT, pintar/cerdas, tegas, iklas, sabar, bijak, adil, berkompetensi, profesional dan harmonis. Dalam hal menjamin hubungan dengan sesama guru, aspek kekeluargaan, saling membantu dan gotong-royong sangat penting diperhatikan guna mendukung prestasi kerja guru. Kepala Madrasah sebagai “top manajemen” mempunyai relatif banyak tugas yang tidak mungkin dapat ditangani sendiri. Oleh karena itu tugasnya dibagi kepada guru-guru. Pembagian tugas tersebut akan dapat terlaksana dengan baik apabila guru menyadari bahwa salah satu perannya adalah membantu Kepala Madrasah. Sebagai contoh; guru yang ditugasi sebagai wali kelas dapat bertindak selaku Kepala Madrasah untuk kelasnya (dalam batas kebijaksanaan madrasah). Guru yang ditugasi sebagai wakil Kepala Madrasah dapat melakukan tugas seperti memimpin rapat apabila Kepala Madrasah berhalangan.

Di Madrasah para guru bisa dikatakan sebagai orang tua siswa. Oleh karena itu hubungan guru dengan siswa sebagaimana hubungan orang tua dan anak yang tentu saja hal tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai agama dan norma-norma masyarakat. Perilaku guru yang dituntut sehubungan dengan itu adalah: 1) disiplin soal waktu, 2) menghargai keberadaan siswa sebagai pribadi yang utuh, 3) berpenampilan rapi, pantas dan ceria, 4) bertanggung-jawab dan bersifat mengayomi, 5) tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah-masalah kesiswaan, 6) dapat “digugu” dan ditiru segala tindak tanduknya. Lebih jauh dari itu, kapasitas guru dalam kegiatan belajar mengajar sedapat mungkin mampu mendorong siswa untuk belajar aktif, membelajarkan siswa belajar, suka membimbing siswa dalam mengajar, tidak

putus asa dalam menghadapi murid bodoh dan “bandel”, bersikap adil, memiliki sejumlah kiat khusus dalam rangka menumbuhkan belajar siswa dan selalu menilai tugas atau pekerjaan siswa.

Hubungan guru dan karyawan madrasah agar diupayakan, menghargai tugas karyawan, dan membantu tugas karyawan yang mengalami kesulitan (masalah) baik secara kedinasan maupun kekeluargaan.

Perilaku guru di rumah dapat dibedakan atas dua bagian yaitu; sebagai anggota keluarga, dan bisa jadi sebagai kepala keluarga, sudah semestinya berpenempilan dapat digugu dan ditiru. Guru sebagai anggota keluarga hendaknya mampu menunjukkan sikap: 1) berjiwa Pancasila, 2) dapat menjadi teladan masyarakat sekitarnya, 3) peduli terhadap lingkungan, 4) menghargai budaya dan kebiasaan setempat dan, 5) senantiasa bersikap sopan. Lain halnya jika guru itu sudah berstatus sebagai kepala keluarga. Guru sekurang-kurangnya dapat mengayomi keluarga, dapat menjadi panutan dan teladan bagi keluarganya dalam mengamalkan pendidikan agama.

Perilaku guru di masyarakat dapat diidentifikasi sekurang-kurangnya menjadi lima butir harapan, seperti: 1) mampu berkomunikasi dengan masyarakat, 2) mampu bergaul dan melayani masyarakat dengan baik, 3) mampu mendorong dan menunjang kegiatan masyarakat, 4) mampu menempatkan diri dan menjadi teladan ditengah-tengah masyarakat, dan 5) mampu menjadi pemimpin masyarakat dan mengabdi pada masyarakat tanpa pamrih, iklas beramal.

Pembentukan pendidikan peserta didik atau seorang anak dipengaruhi oleh tiga peran utama (tri pusat pendidikan) yaitu; peran keluarga, peran madrasah sebagai lembaga pendidikan, dan sosial masyarakat. Pada lingkup keluarga peran orang tua terhadap pendidikan masih sangat dominan, orang tua yang melatih dan memberi petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan, sampai anak menjadi dewasa dan mandiri. Dahulu pada masyarakat tradisional, kehidupan dan masa depan anak tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang tuanya. Tetapi pada masyarakat modern saat ini, pendidikan yang semula menjadi dominasi dan tanggung jawab keluarga, kini mulai diambil alih oleh madrasah atau lembaga pendidikan baik yang formal, informal maupun non formal. Otoritas orang tua dibagi dengan orang lain dimadrasah terutama guru atau wali kelas. Dalam iklim keterbukaan dan masyarakat demokratis sekarang membawa perubahan sifat hubungan orang tua dengan anaknya di keluarga. Dan juga perubahan hubungan guru dengan siswanya di madrasah, serta perubahan tingkah laku anak di masyarakat. Dengan kata lain terdapat peran yang saling mempengaruhi dan saling mendukung diantara ketiganya.

Peserta didik atau anak sebagai generasi penerus bangsa di masa depan adalah penting untuk diperhatikan pendidikannya. Sudah semestinya

menjadi tanggungjawab semua pihak untuk saling memberi dukungan dalam mengawal dan mengawasi proses pendidikan mereka agar berjalan dengan baik, lancar dan bergerak menuju cita-cita bersama yang tertuang dalam tujuan pendidikan.

Dukungan orang tua terhadap madrasah sangat penting, karena peran orang tua di keluarga bagi pendidikan anaknya adalah memberikan dasar pendidikan, sikap dan keterampilan dasar seperti; pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi peraturan-peraturan, dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Pendidikan merupakan salah satu kewajiban pertama bagi orang tua, dan negara menyediakan alat yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban orang tua terhadap anak. Hal di atas menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua dalam menanamkan dasar-dasar sikap dan prilaku anak yang baik sebagai dasar pendidikan anak sebelum diberikan kepada orang lain, baik dalam madrasah sebagai lembaga pendidikan atau sosial masyarakat. Atau tahapan pendidikan anak usia dini. Orang tua harus mengetahui dan memahami perkembangan anaknya, yang meliputi segala aspek kehidupan yang mereka jalani baik bersifat fisik maupun non fisik. Beberapa teori perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia telah tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah/jenjang.

Fungsi utama keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh dan mng sosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan pribadi dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluargha sejahtera. Tanamkan dalam diri anak kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi yang terbaik, dan menguasai kemampuan-kemampuan dasar. Jika keluarga sebagai uit organisasi sosial terkecil gagal, maka akan sulit sekali bagi institusi lain untuk memperbaiki kegagalannya. Karena kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan berakibat pada tumbuhnya anak atau masyarakat yang berkarakter buruk atau tidak berkarakter. Oleh karena itu setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di rumahnya.

Mengasuh adalah mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minum, pakaian dan keberhasilannya dari periode awal hingga dewasa. Berbagai pola asuh orang tua dapat mempengaruhi kreatifitas anak, antara lain; lingkungan fisik, lingkungan sosial, pendidikan internal dan eksternal. Bila orang tua berperan dalam pendidikan, maka anak-anak menunjukkan peningkatan prestasi belajar, diikuti dengan perbaikan sikap, stabilitas sosio-

emosional, kedisiplinan serta aspirasi anak untuk belajar sampai jenjang paling tinggi, bahkan akan membantu anak ketika ia telah bekerja dan berkeluarga.

Kesalahan orang tua dalam mendidik anak yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosi anak, diantaranya; (1) orang tua kurang menunjukkan ekspresi kasih sayang baik secara verbal maupun fisik, (2) kurang meluangkan waktu untuk anak, (2) orang tua bersikap kasar secara verbal, misalnya; menyindir anak, mengecilkan anak dan berkata kasar, (3) bersikap kasar secara fisik, misalnya ; memukul, mencubit, atau memberikan hukuman badannya lainnya, (4) orang tua terlalu memaksa anak untuk menguasai kemampuan kognitif secara dini, (5) orang tua tidak menanamkan karakter yang baik pada anak.

Ketika pendidikan anak di keluarganya mendapatkan dukungan yang baik selanjutnya perlu mendapat dukungan dari lembaga pendidikan dan masyarakat. Pendidikan madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan mempengaruhi perkembangan intelektual anak saja, melainkan juga harus memperhatikan perkembangan watak anak melalui latihan kebiasaan dan tata tertib, pendidikan agama, dan budi pekerti. Kepribadian anak dapat dibangun melalui lembaga pendidikan. Hal demikian diperlukan mengingat anak atau peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang, sehingga perlu ada pengendali atau pengarahan dan dukungan dari orang lain. Tanpa adanya arahan dan dukungan yang baik, maka perkembangan kepribadian anak tidak akan normal.

Jadi saling dukung dari berbagai elemen yang terkait sangat diperlukan karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Sekarang hampir semua madrasah telah mempunyai komite madrasah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu madrasah, sebab masyarakat dari berbagai lapisan sosial ekonomi sudah sadar betapa pentingnya dukungan mereka untuk keberhasilan pembelajaran di madrasah.

D. Guru sebagai *Culture Broker*

Guru adalah sosok yang berbeda dengan pegawai atau kaum terdidik lainnya. Interaksi guru dengan warga masyarakat lainnya menjadi intensif karena warga masyarakat menjadi wali murid dari para siswa yang didiknya. Guru sebagai kaum terdidik dan berbudaya dapat berperan sebagai culture broker yakni agen modernisasi yang secara aktif mengenalkan berbagai kebudayaan bangsa yang adiluhung kepada anak didiknya dan secara tidak langsung juga kepada masyarakat. Jadi guru sebagai warga masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan tetapi juga melayani kebutuhan system social sehingga melalui pendidikan anak didiknya akan membantu masyarakat

berkembang ke arah kemajuan dan sekaligus bisa meningkatkan keberlangsungan hidupnya dan keberlangsungan dunia pendidikan menjadi lebih baik lagi.

Peran Guru sebagai *culture broker* yakni agen modernisasi dikarenakan guru memiliki sumberdaya penguasaan ilmu Agama juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut memberikan dukungan kepada guru dalam memainkan peranan sebagai “makelar budaya”. Terkait hal ini guru memiliki kewajiban menyarung dan mengolah unsur kebudayaan dari luar sehingga sesuai dengan sistem sosiokultural masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sehingga setiap tutur dan perbuatan seorang guru tidak akan menimbulkan disintegrasi social. Segala hal terkait dengan kegiatan seorang guru, baik menyebarkan maupun menanamkan suatu unsur kebudayaan bisa dilakukan melalui keteladanan atau percontohan. Dengan demikian akan mudah ditiru oleh warga masyarakat.

Guru di madrasah sebagai agen perubahan haruslah profesional. Secara akademik guru profesional harus memiliki ciri atau karakteristik menurut Houle (1980) dikutip oleh Suyanto (2006) yaitu: (1) Harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat; (2) Harus berdasarkan kompetensi individual; (3) Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi; (4) Ada kerjasama dan kompetisi yang sehat antar sejawat; (5) Adanya kesadaran profesional yang tinggi; (6) Memiliki kode etik; (7) Memiliki sistem sanksi profesi; (8) Adanya militansi individu; (9) Memiliki organisasi profesi (PGRI).

Pekerjaan Guru bukan merupakan pekerjaan sambilan, sekedar pekerjaan pegangan hidup atau pekerjaan asal jalan. Pekerjaan guru adalah panggilan luhur. Guru adalah seorang kesatria yang berjuang “menang tanpa ngasorake, nglurug tanpa bala, sakti tanpa aji”. Guru harus memiliki integritas, ilmu pengetahuan yang memadai sesuai bidangnya, watak terpuji, kompetensi tinggi, mengikuti pendidikan yang baik tidak cukup hanya dengan pelatihan-pelatihan semata. Penghargaan profesi guru akan tumbuh dalam masyarakat sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas guru dengan ciri-ciri seperti dibahas di atas.

Tugas guru sebagai agen modernisasi, sebagai agen kebudayaan dituntut mampu mengembangkan pendidikan selalu menuju kearah masa depan yang lebih baik. Abad 21 dengan kehidupan global menyebabkan batas-batas negara telah kabur bahkan tanpa batas (*borderless world*) (Ohmae: 1995) dikutip Suyanto (2006:37). Kehidupan suatu Negara ditantang kemampuannya merespon secara fungsional fenomena “4I-E” yaitu (1) *investment*, (2) *industry*, (3) *information technology*, (4) *individual consumers*, dan (5) *Environment*. Setiap investasi harus memberi nilai balik yang memadai, *sustained profitable growth*, langgeng berkelanjutan, menguntungkan, wajar dan adil secara sosial, memberi perlindungan untuk bertahan dan hidup berkelanjutan tanpa batas.

Industri berbasis pengetahuan menjadi trend pilihan penanam modal (investor). Fenomena global jelas merupakan ekternalitas yang berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan.

Modernisasi pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Tugas guru sebagai agen modernisme untuk membawa pendidikan ke arah yang modern. Perkembangan global telah membawa perubahan yang berdampak pada kesenjangan prestasi pendidikan antar wilayah. Kesenjangan diakibatkan oleh perbedaan bentuk-bentuk pengajaran dan penilaian versus apa sesungguhnya yang diperlukan anak didik untuk berhasil sebagai pebelajar, pekerja, dan masyarakat dalam *global knowledge economy* saat ini. Perubahan tersebut sangat kuat pengaruhnya sehingga diperlukan pemahaman dan rethink apa sesungguhnya yang dibutuhkan anak-anak muda kita di abad 21 dan bagaimana mereka berfikir terbaik bahwa masa depan mereka tetap tidak menentu tanpa kepastian. Ketidakpastian adalah *demand driven* dunia kerja abad 21. Saatnya menentukan perubahan kebutuhan pendidikan masa depan “*back-to-basics*” dengan penguatan pada daya adaptabilitas dari “*Old World*” of classrooms in the “*New World*” of work.

Pada masa-masa proses industrialisasi dan modernisasi pendidikan telah mengajarkan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan baru, seperti orientasi ekonomi, orientasi kemandirian, mekanisme kompetisi sehat, sikap kerja keras, kesadaran akan kehidupan keluarga kecil, di mana nilai-nilai tersebut semuanya sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi sosial suatu bangsa. Usaha-usaha madrasah untuk mengajarkan sistem nilai dan perspektif ilmiah dan rasional sebagai lawan dan nilai-nilai dan pandangan hidup lama, pasrah dan menyerah pada nasib, ketiadaan keberanian menanggung resiko, semua itu telah diajarkan oleh guru di madrasah-madrasah sejak proses modernisasi dari perubahan sosial dengan menggunakan cara-cara berpikir ilmiah, cara-cara analisis dan pertimbangan-pertimbangan rasional serta kemampuan evaluasi yang kritis orang akan cenderung berpikir objektif dan lebih berhasil dalam menguasai alam sekitarnya.

Madrasah yang digerakkan oleh guru-gurunya, di samping berfungsi sebagai penghasil nilai-nilai budaya baru juga berfungsi sebagai difusi budaya (*cultural diffision*). Kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial yang kemudian diambil tentu berdasarkan pada hasil budaya dan difusi budaya. Madrasah tersebut bukan hanya menyebarkan penemuan-penemuan dan informasi-informasi baru tetapi juga menanamkan sikap-sikap, nilai-nilai dan pandangan hidup baru yang semuanya itu dapat memberikan kemudahan-kemudahan serta memberikan dorongan bagi terjadinya perubahan sosial yang berkelanjutan.

Fungsi Guru dalam madrasah dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan analisis kritis berperan untuk menanamkan

keyakinankeyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidikan dalam era abad modern telah berhasil menciptakan generasi baru dengan daya kreasi dan kemampuan berpikir kritis, sikap tidak mudah menyerah pada situasi yang ada dan diganti dengan sikap yang tanggap terhadap perubahan. Cara-cara berpikir dan sikap-sikap tersebut akan melepaskan diri dari ketergantungan dan kebiasaan berlindung pada orang lain, terutama pada mereka yang berkuasa. Pendidikan ini terutama diarahkan untuk memperoleh kemerdekaan politik, sosial dan ekonomi. Pendidikan semacam itu telah berhasil membuka mata masyarakat terutama didaerah pedesaan dalam penerapan teknologi maju dan penyebaran penemuan baru lainnya.

Pengaruh dan upaya pengembangan berpikir kritis dapat memberikan modifikasi (perubahan) hierarki sosial ekonomi. Oleh karena itu pengembangan berpikir kritis bukan saja efektif dalam pengembangan pribadi seperti sikap berpikir kritis, juga berpengaruh terhadap penghargaan masyarakat akan nilai-nilai manusiawi, perjuangan ke arah persamaan hak-hak baik politik, sosial maupun ekonomi. Bila dalam masyarakat tradisional lembaga-lembaga ekonomi dan sosial didominasi oleh kaum elite, maka dengan semakin pesatnya proses modernisasi tatanan-tatanan sosial ekonomi dan politik tersebut diatur dengan pertimbangan dan penalaran-penalaran yang rasional. Oleh karena itu timbulah lembaga-lembaga ekonomi, social dan politik yang berdasarkan keadilan, pemerataan dan persamaan. Adanya strata sosial dapat terjadi sepanjang diperoleh melalui cara-cara objektif dan keterbukaan, misalnya dalam bentuk mobilitas vertikal yang kompetitif.

Makna guru jauh lebih tinggi dari makna pengajar (*teacher*). Oleh karena itu lembaga pendidikan tenaga kependidikan harus meletakkan nilai-nilai guru secara mendasar. Agar menjadi guru agung pendidikan, maka seorang calon guru dibentuk kesadarannya untuk: (1) memahami filsafat pendidikan; (2) memahami teori pendidikan; (3) etika guru pendidikan; dan (4) menguasai teknis pembelajaran berbasis kompetensi.

E. Aktualisasi Strategi Kemitraan Keluarga dengan Madrasah

Hubungan keluarga atau orang tua wali peserta didik dengan madrasah dapat dijalin melalui berbagai cara. Misalnya dengan mendatangkan orang tua peserta didik atau tenaga khusus yang kebetulan ada di masyarakat, seperti seorang dokter atau perawat untuk memberikan ceramah atau pelatihan masalah kesehatan madrasah. Mendatangkan pemerhati lingkungan hidup untuk memberikan ceramah atau juga pelatihan tentang pengelolaan lingkungan madrasah yang baik. Mendatangkan kepolisian untuk memberikan ceramah juga pelatihan terkait bahaya narkoba dan tindak kriminal lainnya yang harus dijauhi.

Hal tersebut merupakan aktualisasi kerjasama antara guru dan orang tua atau keluarga peserta didik yang didasari hal-hal sebagai berikut. (1) Adanya kesamaan tanggung jawab bersama, antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. (2) Adanya kesamaan tujuan; orang tua menghendaki putra putrinya menjadi warga Negara dan manusia yang baik serta berguna bagi Negara dan bangsa. Demikian pula para guru menghendaki agar peserta didiknya menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, yang terampil, kreatif, demokratis, serta berguna bagi Negara dan Bangsa (Mulyasa, 2005: 68-69).

Hubungan keluarga peserta didik dengan madrasah dimaksutkan antara lain agar orang tua peserta didik mengetahui berbagai kegiatan yang direncanakan dan dilakukan di madrasah untuk kepentingan peserta didik. Di samping itu agar orang tua peserta didik bersedia memberi perhatian yang besar dalam menunjang program-program madrasah. Tujuan hubungan tersebut menurut Mulyasa (2005: 69-70) antara lain adalah sebagai berikut.

(1). Saling membantu dan saling isi mengisi; Jika di madrasah pembelajaran pada peserta didik telah ditertibkan, jangan sampai di rumah dibiarkan, bahkan ditelantarkan, tidak diberi pembinaan yang seirama dengan di madrasah. Guru dapat memberi informasi tertulis maupun lisan dengan kunjungan kepada orang tua tentang anaknya berkaitan dengan segi-segi positif dan negatif. Dengan memahami kelemahan peserta didik, guru dan orang tua dapat melakukan pembinaan bersama. (2) Mencegah perbuatan-perbuatan yang kurang baik, dalam hal ini guru dan orang tua peserta didik bisa bermitra dalam mencegah dan menanggulang perbuatan yang kurang baik yang mungkin dilakukan anak didik. (3) Membuat rencana bersama-sama terkait pengembangan minat dan bakat peserta didik. (4) Memberikan bantuan financial dan barang untuk peningkatan prasarana dan sarana pendidikan.

Jalinan kemitraan orang tua atau keluarga peserta didik bisa dilakukan melalui komite madrasah. Komite madrasah merupakan suatu lembaga yang perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis madrasah. Anggota Komite madrasah terdiri dari Kepala madrasah, guru, dan tokoh-tokoh masyarakat serta orang tua yang memiliki potensi dan perhatian besar terhadap pendidikan di madrasah. Komite madrasah adalah lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan, bukan didasarkan pada arahan atau instruksi dari lembaga pemerintahan, menganut prinsip transparan, akuntabel, dan demokratis. Kemandirian Komite ini sebenarnya terkait dengan dua hal penting. Pertama, terkait dengan status dan kedudukan Komite Madrasah itu sendiri. Dia tidak menjadi subordinasi (bawahan) dari lembaga lain, khususnya dari lembaga birokrasi (Suparlan, 2011). Lembaga mandiri sebagai wadah yang memiliki kekuatan hukum untuk menampung dan mewujudkan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam

pendidikan. Eksistensi dan posisi Komite Madrasah menjadi semakin kokoh karena adanya payung hukum Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tersebut kemudian diakomodasi ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 56 (Ate dan Gunawa, 2013: 3).

Dalam kerjasama kemitraan tersebut terdapat berbagi jenjang yakni: (1) Jaringan (*networking*): berbagi informasi yang dapat membantu mitra untuk bekerja lebih baik. (2) Koordinasi (*coordination*): berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain supaya tidak saling konflik. (3) Kooperasi (*cooperation*): berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain dan secara nyata ada beberapa aspek pekerjaan yang menjadi tanggungjawab masing-masing. (4) Kolaborasi (*collaboration*): berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain, beberapa aspek dari pekerjaan menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai bidang keahlian dan akhirnya berbagi hasil bersama (Ate dan Gunawa, 2013: 5).

Aktualisasi Kemitraan dapat menggunakan prinsip sebagai berikut. (1) *Participation*: Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-hal yang menyangkut nasibnya dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah diseakati bersama. (2) *Acceptable*: saling menerima dengan apa adanya dalam kesetaraan. Masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. (3) *Communication*: masing-masing pihak harus mau dan mampu mengkomunikasikan dirinya serta rencana kerjanya sehingga dapat dikoordinasikan dan disinergikan. (4) *Trust*: saling mempercayai dan dapat dipercaya untuk membina kerjasama. Di sini transparansi menjadi tuntutan dan tidak bisa ditawar. (5) *Share*: semua yang terlibat dalam kemitraan harus mampu membagikan diri dan miliknya (waktu, "harta" dan kemampuan) untuk mencapai tujuan bersama (Ate dan Gunawa, 2013: 5).

Komite Madrasah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk atas dasar inisiatif masyarakat memiliki peran dan fungsi sangat penting dalam pendidikan. Komite adalah bentuk partisipasi langsung sekaligus menjadi wadah bagi keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penyediaan layanan pendidikan dengan berkualitas tinggi bagi semua terutama untuk golongan misikin. Kedudukan madrasah, keluarga dan masyarakat yang dilembagakan dalam Komite Madrasah adalah sama. Artinya, tidak ada pola hubungan kerja atas-an-bawahan. Yang ada adalah mitra yang sama-sama memiliki komitmen dan tanggung jawab bersama untuk menentukan tujuan bersama. Dalam pola kemitraan yang sifatnya sukarela tetapi sekaligus hak, prinsip yang diterapkan adalah prinsip egaliter. Kesetaraan dalam kemitraan di mana setiap orang memiliki partisipasi sesuai dengan kemampuannya, satu sama lain bisa saling menerima, yang bisa saling mengomunikasikan diri dan

rencanya, direkatkan oleh rasa saling percaya juga kemauan untuk saling berbagi kemampuan, waktu dan “harta” untuk mencapai tujuan bersama.

Sejalan dengan uraian di atas, Azizy (2002) memberikan lima contoh langkah yang perlu diambil dalam hubungan madrasah dengan orang tua peserta didik, yaitu: (1) orang tua dilibatkan dalam pembinaan kepribadian peserta didik; pembentukan karakter atau kepribadian bukan hanya tanggungjawab madrasah tetapi juga orang tua peserta didik, (2) dilibatkan dalam kehidupan di luar madrasah; orang tua memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap kehidupan anaknya. Oleh karena itu komunikasi dengan orang tua diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan pembinaan peserta didik di luar madrasah oleh orang tuanya, (3) dilibatkan dalam proses pembelajaran; harus dikomunikasikan mekanisme agar orang tua merasa bertanggung jawab membantu anaknya dalam mengerjakan tugas-tugas dari madrasah yang harus diselesaikan di rumah, (4) dilibatkan ikut memikirkan kemajuan anaknya; hal ini terutama terkait dengan biaya tambahan untuk kemajuan madrasah tempat anaknya belajar. Keterlibatan ini telah biasa dilakukan dengan komite di tiap-tiap madrasah. (5) membimbing dan membina anaknya sejalan dengan program madrasah. Misalnya; akan lebih baik jika misalnya orang tua juga member tugas pada anaknya seperti laporan tertulis, laporan lisan, membaca, kemudian dilaporkan pada orang tuanya. Hal ini sejalan dengan madrasah yang juga menjalankan program semacam ini.

Relatif banyak masalah timbul sebagai akibat dari perilaku, perbuatan dan ucapan pesert didik. Masalah-masalah tersebut bisa dikelompokkan sebagai berikut. (1) Masalah yang berhubungan dengan keadaan tubuhnya, (2) Masalah yang berhubungan dengan keadaan mentalnya, (3) Masalah yang berhubungan dengan belajarnya (Mulyasa, 2005: 73). Guru harus menanamkan pengertian kepada seluruh peserta didik untuk saling menghargai, dan tidak boleh “mencemooh” atas kelemahan orang lain. Guru harus juga secara santun menyampaikan kepada orang tua peserta didik jika anaknya “bermasalah”. Hal ini perlu dilakukan karena kadang-kadang ada orang tua yang kurang bisa menerima atau tidak mau mengerti bahwa anaknya bermasalah. Untuk itu perlu dijalin kerjasama yang harmonis sehingga tidak terjadi salah pengertian antara guru dan orang tua. Guru dan orang tua harus benar-benar bekerja sama agar memiliki pemahaman yang sama terkait kelemahan-kelemahan peserta didik, dan bisa memberikan bantuan kepada peserta didik secara optimal.

F. Aktualisasi Strategi Kemitraan Masyarakat dengan Madrasah

Hubungan madrasah dengan masyarakat merupakan bentuk komunikasi eksternal yang dilakukan atas dasar kesamaan tanggungjawab dan tujuan. Masyarakat merupakan kelompok dari individu-individu, keluarga-keluarga, yang berusaha menyelenggarakan pendidikan atau membantu

usaha-usaha pendidikan. Dalam masyarakat terdapat lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, lembaga keagamaan, kepramukaan, politik, social, olah raga, kesenian yang bergerak dalam usaha pendidikan. Dalam masyarakat juga terdapat individu-individu yang bersimpati terhadap pendidikan di madrasah.

Berdasar dimensi kepentingan madrasah, hubungan masyarakat dengan madrasah memiliki tujuan untuk: (1) memelihara kelangsungan hidup madrasah, (2) meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, (3) memperlancar kegiatan pembelajaran (4) memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program madrasah (Mulyasa, 2005: 75).

Berdasarkan dimensi kebutuhan masyarakat, hubungan masyarakat dengan madrasah memiliki tujuan untuk: (1) memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (2) memperoleh kemajuan madrasah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, (3) menjamin relevansi program madrasah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, (4) memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang terampil, makin meningkat kemampuannya dan ketaqwaaannya (Mulyasa, 2005: 75).

Masyarakat bisa menyelenggarakan pendidikan yang bersifat spesialisasi seperti keahlian. Hubungan harmonis antara madrasah dan masyarakat dalam mengembangkan program bersama bagi pembinaan peserta didik, dapat mengurangi dan mencegah kemungkinan anak berbuat nakal atau menyimpang, karena program yang padat dan menarik. Tidak memberi kesempatan atau kemungkinan peserta didik untuk berkhayal atau berbuat yang kurang baik.

Setiap madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan yang ada di dalam masyarakat, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan madrasah dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah seperti perguruan tinggi, madrasah yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya. Madrasah harus mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, dunia industri, dunia usaha, alumni dan satuan pendidikan lainnya di dalam masyarakat.

Ada berbagai cara memperkenalkan madrasah kepada masyarakat, antara lain dengan cara sebagai berikut. (1) Melaksanakan program-program kemasyarakatan. (2) Mengadakan *open house*. (3) Membuat buletin madrasah. (4) Mengundang tokoh sebagai pembicara atau Pembina program madrasah. (5) Membuat program kerjasama antara madrasah dengan masyarakat.

Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat bisa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. (1) Mengidentifikasi orang-orang kunci. (2) Melibatkan orang-orang kunci dalam kegiatan madrasah. (3)

Memilih saat yang tepat. Menurut Stewart perlu seperangkat kecakapan baru yang perlu dikuasai oleh manajer era (kepala madrasah) baru, yaitu harus mampu membuat mampu (*enabling*), memperlancar (*facilitating*), berkonsultasi (*consulting*), bermitra (*collaborating*), membimbing (*mentoring*), dan mendukung (*supporting*). (Suryabrata, 1998).

Dalam rangka manajemen berbasis madrasah, maka hubungan madrasah dengan masyarakat dapat dijalin juga melalui komite madrasah, kampanye pendidikan, rapat bersama, konsultasi, radio, televisi, internet, surat, telepon, pameran madrasah, serta ceramah.

Sebagaimana telah dibahas di awal bahwa Komite madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 butir 25). Komite madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 56 ayat 3). Tim kerja adalah tim yang dibentuk oleh kepala madrasah untuk mengembangkan kerjasama dan kemitraan madrasah yang terdiri atas wakil-wakil kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan komite madrasah selaku anggota merangkap sebagai ketua Tim.

Kampanye Pendidikan merupakan jenis kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat, dan berbagai pihak yang berkepentingan dan terkait dengan pengelolaan madrasah, agar tergugah untuk ikut berpartisipasi melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dijalankan di madrasah.

Melalui rapat bersama, madrasah dapat mengundang lembaga di masyarakat yang bersimpati terhadap pendidikan untuk mengadakan rapat bersama guna membahas suatu permasalahan.

Melalui konsultasi, Madrasah dapat melakukan konsultasi mengenai peserta didik dengan seorang ahli yang ada di masyarakat. Misalnya; ada peserta didik yang mengalami gangguan penglihatan maka seorang guru bisa berkonsultasi dengan dokter ahli. Hasilnya dapat digunakan dasar untuk mencari solusi yang tepat.

Melalui radio dan televisi, internet, surat dan telepon, Masyarakat sekarang yang sangat terbiasa dengan media tersebut, maka madrasah bisa menyampaikan informasi melalui media-media tersebut. Apabila menemukan kesulitan dengan cara-cara tersebut di awal maka bisa juga menggunakan surat dan telepon. Melalui surat dan telepon bisa ditanyakan pada ahli cara penanganan masalah-masalah yang dihadapi para peserta didik. Juga bisa mengundang para ahli untuk memberikan ceramah bahkan pelatihan.

Pameran madrasah bisa dilakukan secara rutin dan berkala setahun sekali. Waktunya bisa diakhir tahun ajaran. Madrasah dapat memprogramkan memamerkan hasil-hasil karya peserta didik termasuk pementasan karya seni, tulis, ketrampilan dan lain-lain.

Sejalan dengan hal tersebut, Azizy (2002) memberikan contoh upaya yang bisa dilakukan oleh kepala madrasah agar masyarakat bersedia terlibat aktif secara langsung dan bertanggungjawab terhadap kemajuan madrasah adalah sebagai berikut. (1) Sosialisasi kepada pemimpin formal, meliputi eksekutif dan legislatif. Segenap pimpinan madrasah bisa pro-aktif untuk meyakinkan mereka. Segenap pimpinan madrasah bisa presentasi program-program madrasah dalam rangka mencerdaskan generasi masa depan di daerahnya. (2) Melibatkan pejabat daerah (eksekutif dan legislatif) untuk ikut memiliki madrasah. Bawa madrasah adalah milik masyarakat, dari oleh dan untuk masyarakat. Maju-mundurnya, berhasil atau gagalnya madrasah memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan daerah setempat. Oleh karena itu pejabat daerah (eksekutif dan legislatif) untuk ikut bertanggung-jawab terhadap keberhasilan madrasah. (3) menunjukkan program langsung, disamping mendidik anak anak daerah, seperti menunjukkan prestasi peserta didik, guru madrasah atau keberhasilan masyarakat secara keseluruhan.

SIMPULAN

Pada masyarakat modern sangat merasakan pentingnya fungsi madrasah. Meskipun demikian madrasah tidak bisa menggantikan peranan keluarga dan masyarakat sepenuhnya. Karena ketercapaian tujuan pendidikan mutlak memerlukan kerjasama antara keluarga, masyarakat dan madrasah. Mereka bersifat saling ketergantungan dalam mencapai tujuan pendidikan, yang sekaligus berarti pula menjaga kelestarian *system social*.

Wujud perilaku kemitraan antara *system social* tidak selalu dalam bentuk sistem formal, yakni mereka bertindak karena diwajibkan oleh kaidah-kaidah yang berlaku, namun kadang berbentuk perilaku informal antara lain adalah kontribusi sosial dan material dengan harapan agar guru lebih bergairah lagi dalam menjalankan tugasnya.

Guru bisa berperan sebagai *culture broker* yakni agen modernisasi dikarenakan guru memiliki sumberdaya penguasaan ilmu Agama juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kelebihan guru tersebut mengakibatkan tidak sedikit guru dihargai dan menduduki posisi penting di lingkungan sosial kemasyarakatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Azizy, Q. 2002. *Pendidikan Agama untuk Membangun Etika Sosial (Mendidik Anak Sukses Masa Depan: Pandai dan Bermanfaat)* Semarang: Aneka Ilmu
- Ate, P. M & Gunawan, B. 2013. *Makalah Kemitraan Madrasah Keluarga Dan Masyarakat.* <http://www.anekamakalah.com/2013/01/kemitraan-madrasah-keluarga-dan.html> diakses tanggal 19 -2- 2018
- Driyarkara. 1980. *Driyarkara Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- 2006. Karya Lengkap *Driyarkara*. A. Sudiardja, dkk (ed). Yogyakarta: Penerbit Kompas, Gramedia & Kasinibus
- Dwiningrum, S. I. A. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faisal, S, dkk. 2007. *Partisipasi Masyarakat terhadap Madrasah*, Malang: Universitas Negeri Malang
- Faqih, M. 2011. *Menegakkan Hak Beragama di Tengah Pluralisme*. (Jurnal Konstitusi: ISSN 1829-7706). Volume 8 Nomor 4, Agustus 2011. Halaman: 428-452. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia
- Goode, W. J. 1983. *Sosiologi Keluarga*. Alih Bahasa oleh. Sahat Simamora, , Jakarta: PT. Bina Aksara
- Grant, C. A. 1979. *Community Participation in Education*. Boston: Allyn and Bacon, Inc
- Hamafik, O . 2000. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Light, D., Keller, S., & Calhoun, C. 1989. *Sociology* Edisi. Kelima. New York: Alfred A. Knorp. New York
- Mulyasa. 2005. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Jakarta: Departemen Agama RI. Dirjen Kelembagaan Agama Islam
- Mulyasa, E. 2007. *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan pembelajaran Keatif dan Menyenangkan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Russel & Bernardin, 1993. *Human Resource Management*. New Jersey : International Editions Upper Saddle River, Prentice Hall

Suryabrata, S. 1998. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suparlan. 2009. *Arahan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah Sampai Dengan Tahun 2009*, <http://www.suparlan.com/pages/posts/arah-pembinaan-dewan-pendidikan-dan-komite-madrasah-sampai-dengan-tahun-2009153.php>. diakses 8 Oktober 2011

Suyanto, 2006. *Dibelantara Pendidikan Bermoral*. Yogyakarta: UNY Press